



|             |                 |              |
|-------------|-----------------|--------------|
| Media Title | Kontan          |              |
| Date        | 4 Desember 2014 | Color        |
| Section     | News            | Circulation  |
| Page No     | 20              | Article Size |
| Journalist  | Fahriyadi       | Advalue      |
| Frequency   | Daily           | PR Value     |

PROYEK JALAN TOL

## Dana Pembebasan Lahan Kurang Rp 5 T

JAKARTA. Dalam lima tahun ke depan pemerintah menargetkan untuk membangun jalan tol sepanjang 1.562 kilometer (km). Namun, target tersebut menyebabkan pembengkakan anggaran untuk pembebasan lahan jalan tol mulai tahun depan.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Djoko Murjanto mengatakan, untuk mewujudkan rencana pembangunan jalan tol sepanjang 1.562 km, mulai tahun depan dibutuhkan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 7 triliun. "Alokasi anggaran di APBN 2015 hanya Rp 2 triliun, jadi kami butuh tambahan Rp 5 triliun," ujar Djoko, Rabu (3/12).

Menurutnya kesiapan dana ini penting mengingat pemerintah akan fokus untuk membebaskan lahan dalam dua tahun pertama. Alhasil, pada tiga tahun berikutnya, tinggal mengerjakan konstruksi.

Salah satu ruas yang bakal

menjadi fokus pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan tahun depan adalah jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa.

Kendati membutuhkan tambahan dana yang cukup besar, namun pemerintah tak bisa memastikan dana tersebut akan terpakai. Sebab, penggunaannya tergantung kondisi lapangan.

Seperti diketahui, sulitnya pembebasan lahan selama ini lebih banyak karena keengganan masyarakat melepas tanah milik mereka, bukan karena anggaran. Catatan KONTAN, masyarakat enggan, karena aspek kepentingan publik pada proyek jalan tol relatif kecil.

Meskipun begitu, Djoko optimistis pembangunan jalan tol ke depan lebih lancar. Selain karena tersedia Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah yang memberi kepastian waktu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta masyarakat untuk kooperatif.

Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia Fatchur Rochman menilai pemerintah sulit untuk membebaskan tanah untuk proyek jalan tol ini dalam waktu satu tahun meski tersedia dana tambahan Rp 5 triliun. Menurutnya, berdasarkan UU Pengadaan Tanah, pemerintah bisa membebaskan seluruh tanah jalan tol maksimal dalam waktu dua tahun.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pulau Sumatera   | 346 km          |
| 2. Pulau Jawa       | 1.078 km        |
| a. Trans Jawa       | 654 km          |
| b. Jabodetabek      | 250 km          |
| c. Non Trans Jawa   | 174 km          |
| 3. Pulau Kalimantan | 99 km           |
| 4. Pulau Sulawesi   | 39 km           |
| <b>Total</b>        | <b>1.562 km</b> |

Sumber: Kementerian PU-Pera

B. Naratama, Fahriyadi